

Lulus Tanpa Skripsi : Bukan Trend Baru Bagi Kelulusan Mahasiswa di Era Modern

Category: News

1 September 2023



Prolite – Ternyata, ada beberapa mahasiswa berhasil lulus tanpa skripsi. Hal ini terjadi bahkan sebelum ada kebijakan dari Menteri Pendidikan yang mengubah tugas akhir perkuliahan tidak harus selalu berbentuk skripsi.

Telah diketahui sebelumnya, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim mengumumkan bahwa skripsi tidak lagi menjadi syarat wajib kelulusan mahasiswa program sarjana di perguruan tinggi.

Lulus Tanpa Skripsi Ternyata Sudah Ada Sebelum Kebijakan Menteri Dikeluarkan



Ilustrasi mahasiswa – Cr. Edward Ricardo

Metode mahasiswa lulus tanpa harus mengerjakan skripsi ternyata sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu.

Mereka menggantikan tugas akhir yang sering menjadi beban dengan kegiatan lain seperti review buku, film, atau bahkan pameran karya.

Metode lulus tanpa skripsi ini bukanlah hal baru, bahkan sebelum kebijakan dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim diberlakukan.

Ginanjari Saputra, seorang lulusan Sastra Inggris dari Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Diponegoro (Undip) Semarang angkatan 2010, merupakan contoh nyata dari mahasiswa yang memilih jalur nonskripsi.

Pada tahun kelulusannya pada tahun 2015, Ginanjari memilih opsi tersebut yang memungkinkannya untuk mengambil tiga mata kuliah tambahan dengan total enam SKS.

Meskipun demikian, pilihan ini berarti bahwa ia harus menyelesaikan final proyek sebagai pengganti skripsi.

Ginanjari menjelaskan bahwa ketiga mata kuliah tambahan yang harus diambil berkaitan dengan pendidikan keguruan, jurnalistik, dan wirausaha.

Dia kemudian memilih untuk mengerjakan final proyek dalam bentuk review buku. Salah satu perbedaan utama antara final proyek dan skripsi adalah panjang halaman.

Karya final proyeknya memiliki kurang dari 30 halaman, dan yang membedakannya lagi adalah bahwa dalam final proyek tidak diperlukan penerapan metodologi yang umumnya ditemukan dalam skripsi, meskipun teori masih tetap digunakan.

Ginanjari, yang kini bekerja sebagai pekerja swasta dan berasal

dari Klaten, mengungkapkan bahwa kebijakan prodi tersebut memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk lulus lebih cepat.

Ia memilih jalur nonskripsi karena minatnya pada buku dan memilih untuk mengevaluasi buku dalam bentuk review.

Alasan lainnya adalah karena final proyek ini bisa diselesaikan lebih cepat dibandingkan dengan skripsi tradisional.



Ilustrasi mengerjakan proyek akhir – Cr.

Dania Rachma, lulusan Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Diponegoro (Undip) Semarang angkatan 2016, juga memiliki pengalaman serupa.

Perempuan asal Sukoharjo tersebut berhasil lulus tanpa skripsi. Seperti Ginanjar, ia juga diberikan tugas untuk mengerjakan proyek sebagai alternatif dari skripsi konvensional.

Dania menjelaskan bahwa dalam proyek tersebut, mahasiswa diberikan kebebasan untuk menulis tentang berbagai topik seperti pertunjukan, film, lagu, dan hal-hal lain yang terkait dengan sastra Inggris.

Proyek ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan kreativitas mereka dalam mengeksplorasi berbagai aspek budaya populer.

Seperti halnya dalam kasus Ginanjar, proyek ini juga memungkinkan Dania untuk menunjukkan pemahamannya tentang sastra Inggris tanpa perlu melibatkan metodologi penelitian seperti dalam skripsi konvensional.

Tujuan Kebijakan Mendikbudristek



Pemaparan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim di Youtube resminya KEMENDIKBUD RI

Kebijakan ini merupakan bagian dari Merdeka Belajar Episode Ke-26 Tentang Transformasi Standar Nasional dan Akreditasi Pendidikan Tinggi.

Nadiem mengatakan, kebijakan lulus tanpa skripsi ini bertujuan untuk memberikan kebebasan dan otonomi kepada perguruan tinggi untuk menentukan tugas akhir yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik program studinya.

“Skripsi bukanlah satu-satunya cara untuk mengukur kompetensi mahasiswa. Masih banyak metode lain yang bisa digunakan,” kata Nadiem dalam keterangannya.

Nadiem mengatakan, perguruan tinggi tetap bisa menetapkan skripsi sebagai syarat kelulusan jika memang dirasa diperlukan.

Namun, perguruan tinggi juga bisa menetapkan tugas akhir lain yang relevan dengan program studinya, seperti proyek, karya tulis ilmiah, atau pengabdian masyarakat.

Kebijakan lulus tanpa skripsi ini disambut baik oleh berbagai pihak, termasuk mahasiswa. Mereka menilai kebijakan ini akan memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk memilih tugas akhir yang sesuai dengan minat dan kemampuannya.



Pemaparan terkait perubahan standar kompetensi lulusan

“Skripsi itu cukup berat dan menyita waktu. Dengan adanya kebijakan ini, mahasiswa bisa lebih fokus pada hal-hal yang

memang mereka sukai,” kata seorang mahasiswa di Jakarta.

Meskipun demikian, ada juga pihak yang mengkritik kebijakan ini. Mereka menilai skripsi merupakan salah satu cara untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam melakukan penelitian.

“Skripsi itu penting untuk melatih mahasiswa dalam berpikir kritis dan menyelesaikan masalah,” kata seorang dosen di Bandung.

Nadiem mengatakan, perguruan tinggi akan terus berdiskusi dengan berbagai pihak untuk menyempurnakan kebijakan lulus tanpa skripsi ini.

Nadiem Makarim Buat Aturan Baru : Mahasiswa S1 Tidak Wajib Buat Skripsi untuk Syarat Kelulusan

Category: News
1 September 2023



SKRIPSI

Prolite – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek), Nadiem Makarim, telah mengumumkan bahwa ke depannya, mahasiswa tingkat Sarjana (S1) dan Sarjana Terapan tidak akan diwajibkan untuk menyelesaikan skripsi sebagai persyaratan kelulusan.

Hal serupa juga berlaku bagi mahasiswa yang mengambil jenjang magister (S2) dan doktor (S3), di mana tesis atau disertasi tidak lagi menjadi kewajiban, dan kewajiban untuk mengunggah jurnal penelitian juga akan dihapus.

Pengumuman mengenai kelonggaran dalam tugas akhir seperti skripsi, tesis, dan disertasi ini diumumkan oleh Nadiem Makarim saat peluncuran episode ke-26 dari program Merdeka Belajar dengan topik Transformasi Standar Nasional dan Akreditasi Pendidikan Tinggi.

Tujuan Diberlakukannya Aturan Baru dari Nadiem Makarim



Cr. Instagram @nadiemmakarim

Nadiem Makarim menjelaskan bahwa langkah ini diambil karena banyak kendala yang dihadapi baik oleh institusi pendidikan maupun mahasiswa terkait dengan persyaratan tugas akhir tersebut.

Kebijakan ini sebenarnya akan membantu mengurangi beban waktu dan hambatan yang selama ini dihadapi oleh mahasiswa dan perguruan tinggi.

Selain itu, kebijakan ini juga memberikan peluang bagi mahasiswa dan institusi pendidikan untuk lebih fleksibel dalam merancang proses pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.

Nadiem Makarim menjelaskan bahwa dengan menghilangkan persyaratan tugas akhir yang kaku, perguruan tinggi akan lebih mampu menyesuaikan metode pembelajaran sehingga lebih relevan dengan dunia nyata.

Ini juga membuka peluang bagi perguruan tinggi untuk mengakui dan menilai hasil pembelajaran di luar ruang kelas, seperti kolaborasi dengan industri, proyek nyata, dan pengalaman praktis yang dapat memberikan wawasan lebih mendalam kepada mahasiswa.

Langkah ini sejalan dengan semangat transformasi pendidikan yang lebih adaptif, inovatif, dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan masyarakat, serta memberikan mahasiswa kebebasan lebih besar untuk mengembangkan potensi dan minat mereka di luar batasan tugas akhir tradisional.

Kebijakan ini memang memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi mahasiswa dalam merancang tugas akhir mereka.

Dengan berbagai bentuk tugas akhir yang diperbolehkan, seperti prototipe, proyek, atau bentuk lainnya, mahasiswa memiliki kesempatan untuk lebih kreatif dalam menghasilkan luaran yang sesuai dengan bidang studi dan minat mereka.

Nadiem Makarim juga menegaskan bahwa keputusan ini ada di tangan masing-masing perguruan tinggi, artinya kebijakan ini memberikan fleksibilitas bagi institusi untuk menentukan cara terbaik dalam mengevaluasi kemajuan akademis mahasiswanya.

Hal ini memperlihatkan bahwa pemerintah memberi kepercayaan kepada perguruan tinggi untuk menyesuaikan pedoman mereka sesuai dengan visi dan misi institusi masing-masing.

Semoga perubahan ini dapat memberikan manfaat yang lebih besar dalam mendukung proses pembelajaran yang lebih adaptif, inovatif, dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan dunia kerja.